

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Bachtiar, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Pamulang.
- Bernhard Limbong, 2012, *Reforma Agraria*, Margaretha Pustaka; Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Opini Kebijakan Agraria*, Pustaka Margaretha, Jakarta.
- Farida Patittingi, Abrar Saleng, Kahar Lahae, dkk, 2021, *Pengkajian Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Produksi Padi*, Litera, Yogyakarta
- Gunawan Wiradi, 2009, *Seluk Beluk Masalah Agrarian: Reforma Agrarian dan Penelitian Agrarian*, Stpn Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2000, *Reformasi Agraria; Perjalanan yang Belum Berakhir*, INSIST Press, Yogyakarta.
- Irawan Soerodjo, 2014, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Ida Nurlinda, 2009 *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia, Depok.
- Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, 2021, “*Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*”.
- Lestari T, 2009, *Dampak Konversi Lahan Pertanian bagi Taraf Hidup Masyarakat*, Mandar Maju, Bandung.
- Lexi J.Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Ilham Arisaputra, 2015, *Reforma Agraria Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta.

Prpto Yudono, Azwar Maaz, Christanti Sumardiyono, dkk, 2018, *Pengantar Ilmu Pertanian*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Sri Susyanti Nur, 2010, *Urgensi Bank Tanah*, Pustaka Pena Press, Makassar.

Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Alfabeta, Bandung.

Urip Santoso, 2017, *Hukum Agraria:Kajian Komprehensif*, Cetakan ke 6, Kencana, Jakarta.

#### **Jurnal:**

Ayu, Isdiyana Kusuma, Benny Krestian Heriawanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia." JU-ke (Jurnal Ketahanan Pangan) Vol 2, Nomor 2 2018 .

Amaliyah, Amaliyah, et al. "Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah." HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 5, Nomor 1 Februari 2021.

Eka N.A.M. Sihombing, "Analisis Kebijakan Insentif Dalam Rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Indonesia", Jurnal Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 36, Nomor 1 Maret 2021.

Elizabeth Roosganda "Strategi pencapaian diversifikasi dan kemandirian pangan: Antara harapan dan kenyataan", Iptek Tanaman Pangan Vol. 6 Nomor 2, 2011.

Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governmance dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", Yuridika, Vol. 28, Nomor 2 Mei-Agustus 2013.

\_\_\_\_\_, "Reforma agraria untuk mewujudkan kedaulatan pangan." Rechtidee Vol, 10 Nomor 1 2015

Noor Hafidah, Mulyani Zulaeha, Lies Ariyani. "Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap perlindungan hak masyarakat atas pangan studi di Kabupaten Banjar", Badamai Law Journal, vol. 2, Nomor 1 2017.

Sari, Indah. "Hak-hak atas tanah dalam sistem hukum pertanahan di Indonesia menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." Jurnal Mitra Manajemen, vol. 9, Nomor 1 2020.

Siti Chadijah, Dwi Kusumo Wardani, Ali Imron, "Kebijakan Reforma Agraria Terhadap Lahan Pertanian di Kabupaten Tulungagung", JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 6, Nomor 1 September 2020.

### **Website:**

<https://tphtakalar.wordpress.com/luas-lahan-pertanian/>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

[https://sulselprov.go.id/pages/des\\_kab/18](https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/18) diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

<http://kbbi.web.id/tanah>, diakses pada tanggal 31 Mei 2023.

<http://www.loggerindo.com/lahan-pertanian-97>, diakses pada tanggal 1 Januari 2023.

<http://spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2023.

### **Skripsi:**

Eka Fitrianiingsih, 2017, "Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Nonpertanian (Permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Sri Hernita, 2018, "Alih Fungsi Lahan (Satu Kajian Sosiologi Pedesaan Masyarakat Ulu Era Kabupaten Bantaeng)", Skripsi, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Progran Studi Pendidikan Sosiologi, Universitas Muhammadiyah Makassar.

**Artikel:**

Endang Pandamdari, "Harapan sejahtera dan adil melalui Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria." Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum, Vol. 1, Nomor 2, 2019.

**Peraturan perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Pokok Agraria tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jenderal Sudirman No.28 Telp. ( 0418 ) 323291 Kab. Takalar*

Takalar, 19 Juni 2023

Nomor : 233/IP-DPMPTSP/VI/2023  
 Lamp. : -  
 Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a  
 Yth. 1. Kepala Dinas PUPRPKP Kab. Takalar  
 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Takalar  
 3. Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Takalar  
 Di-  
Takalar

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Nomor : 4229/UN4.5.1/PT.00/2023, tanggal 15 Juni 2023, perihal Izin Penelitian dan Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Takalar Nomor: 070/236/BKBP/VI/2023 tanggal 19 Juni 2023, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : SRI RAHAYU  
 Tempat Tanggal Lahir : Balang, 26 November 1998  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1) UNHAS  
 Alamat : Balang Desa/Kel. Bontomanai  
 Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

Bermaksud akan mengadakan penelitian di kantor/instansi/wilayah kerja Bapak/Ibu dalam Rangka Penyusunan *Skripsi* dengan judul :

**“PELAKSANAAN KETENTUAN REFORMA AGRARIA DALAM RANGKA  
 PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN  
 DI KABUPATEN TAKALAR “**

Yang akan dilaksanakan : 19 Juni 2023 s/d 22 Juni 2023  
 Pengikut / Peserta : -

Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan dimaksud kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
2. Penelitian tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku ;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Adat Istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil *Skripsi* Kepada Bupati Takalar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Takalar ;
5. Surat pemberitahuan penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian disampaikan kepada saudara ~~anda~~ dan seperlunya.

Kepala Dinas,  
  
**Andi RIJAL MUSTAMIN, M.M**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP : 19740731992111001

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Takalar di Takalar (sebagai laporan),
2. Kepala Bapelitbang Kab. Takalar di Takalar,
3. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Takalar di Takalar,
4. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UNHAS di Makassar ;
5. Peringgal,